

BAB IV
WORLD OCEAN CONFERENCE (WOC) 2009 SEBAGAI INSTRUMEN
DIPLOMASI MULTILATERAL INDONESIA

Pada bab sebelumnya disebutkan bahwa perubahan iklim cukup berdampak besar terhadap laut Indonesia. Dampak perubahan iklim terhadap laut Indonesia berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia, yaitu mempengaruhi eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan pusat keanekaragaman ekosistem laut terbesar di dunia, serta turut berpengaruh terhadap upaya peningkatan tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia yang banyak bergantung pada laut.

Sebagaimana diketahui bahwa kepentingan nasional merupakan hal penting dan mendasar bagi suatu negara, maka diperlukan langkah cepat dan tepat dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi atau melakukan penanganan dampak perubahan iklim terhadap laut, terutama melalui diplomasi Indonesia di forum internasional.

Dalam pelaksanaan diplomasi banyak cara yang dapat digunakan, baik secara unilateral, bilateral, ataupun multilateral. Pemilihan penggunaan media diplomasi tersebut dapat dilihat dari tingkat atau ruang lingkup pembahasan suatu isu dalam pergaulan internasional.

Mengingat permasalahan perubahan iklim telah menjadi permasalahan internasional, maka dalam pembahasan penanganan dampak perubahan iklim terhadap laut, Indonesia beranggapan bahwa diplomasi bilateral yang telah dilakukan sebelumnya tidak mencapai maksimal mengingat isu laut dan

perubahan iklim tidak hanya dialami oleh beberapa negara melainkan seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, Indonesia memilih untuk menggunakan diplomasi multilateral, yaitu melalui penyelenggaraan *World Ocean Conference* (WOC) 2009 yang menghasilkan sebuah komitmen bersama mengenai pemeliharaan laut yang tertuang dalam *Manado Ocean Declaration* (MOD).

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai inisiasi dan persiapan penyelenggaraan WOC 2009, pelaksanaannya, dan juga mengenai MOD yang merupakan hasil dari penyelenggaraan WOC 2009 tersebut.

A. Inisiasi Penyelenggaraan WOC 2009

World Ocean Conference (WOC) 2009 adalah sebuah forum bagi masyarakat dunia untuk membicarakan mengenai isu kelautan yang terkait dengan perubahan iklim, dimana kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan pemahaman bersama dan komitmen yang kuat untuk mengatasi dampak perubahan iklim di lautan dunia dan untuk meningkatkan kesadaran mengenai peran laut dalam menentukan laju perubahan iklim global. Forum ini juga dimaksudkan untuk mencapai sebuah kesepakatan internasional dan menyusun strategi adaptif untuk menggunakan sumber daya kelautan dengan bijaksana demi mencapai kepentingan kemanusiaan.

Ide penyelenggaraan WOC 2009 ini berawal dari inisiatif Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang, pada tahun 2006, yang berniat mengadakan suatu kegiatan promosi Sulawesi Utara untuk meningkatkan nilai pariwisata

Sulawesi Utara sehingga mampu menjadi 'Bali kedua' bagi Indonesia⁷⁶. Pemerintah Pusat kemudian melihat gagasan tersebut dapat mendukung upaya Indonesia dalam mengangkat isu kelautan dalam pembahasan perubahan iklim di forum internasional, yang kemudian menetapkannya sebagai program prioritas Pemerintah Indonesia. Melalui Keputusan Presiden RI No.23/2007 dan Keppres No.17/2008, maka Panitia *World Ocean Conference (WOC) 2009* dibentuk⁷⁷. Bertindak sebagai Ketua Pengarah adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Ketua Pelaksana WOC 2009 dijabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Ketua adalah Gubernur Sulawesi Utara, sedangkan Sekretaris WOC 2009 dijabat Sekretaris Menko Kesra dan Wakil Sekretaris WOC 2009 adalah Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan DKP⁷⁸. Kemudian berdasarkan Keppres No.30/2008, *Coral Triangle Initiative (CTI) Summit* dijadikan bagian dari rangkaian kegiatan WOC 2009⁷⁹, Ide penyelenggaraan WOC 2009 inipun mendapat dukungan dari dunia internasional serta dimasukkan sebagai agenda resmi di beberapa organisasi internasional, seperti UNEP, UNHabitat, UNDP, UNICPLOS, IOC-UNESCO, dan lainnya.

Gagasan mengenai pelaksanaan WOC 2009 ini sejalan dengan politik lingkungan yang diusung oleh Indonesia dalam kaitannya dengan perubahan iklim global, yaitu untuk mengangkat dan memasukkan isu kelautan dalam pembahasan perubahan iklim di forum UNFCCC. Masalah kelautan menjadi fokus Indonesia

⁷⁶ *Tabloid Diplomasi DEPLU*, edisi 15 April-14 Mei 2009.

⁷⁷ Final Press Release: Laporan Capaian Panitia Penyelenggara WOC 2009 dan CTI Summit serta Langkah Menuju ke COP-15 UNFCCC Kopenhagen (*diunduh pada tanggal 25 desember 2009*); dalam <http://beritamanado.com/2009/05/26/final-press-release-laporan-capaian-panitia-penyelenggara-woc-2009-dan-cti-summit-serta-langkah-menuju-ke-cop-15-unfccc-kopenhagen/>.

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

karena pemerintah Indonesia menyadari bahwa dengan luasnya wilayah laut Indonesia maka perlu dicari kebijakan alternatif termasuk dengan mengoptimalkan pemanfaatan sektor kelautan untuk mengatasi krisis energi, krisis pangan, dan krisis ekonomi, serta untuk mendukung pembangunan nasional. Namun sayangnya isu kelautan belum menjadi bagian dari pembahasan perubahan iklim di UNFCCC ataupun forum internasional lainnya. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya penelitian dan data yang valid, termasuk oleh IPCC, mengenai kaitan perubahan iklim dengan laut, dimana memang penelitian mengenai laut memakan dana besar dan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, Indonesia melalui WOC 2009 berupaya meyakinkan dunia mengenai pentingnya laut dengan mengupayakan adanya penelitian mengenai pentingnya laut dalam mengatur laju perubahan iklim.

Tema yang diangkat pada kegiatanyang direncanakan akan dihadiri oleh perwakilan dari 121 negara di dunia ini adalah adalah *'Ocean and Climate Change: Climate Change Impacts to Oceans and the Role of Oceans to climate Change'*⁸⁰. Tema ini diambil sesuai dengan latar belakang penyelenggaraan WOC 2009, yaitu untuk memberikan pemahaman kepada dunia internasional mengenai dampak perubahan iklim terhadap kondisi laut dan peran laut dalam upaya penanganan perubahan iklim global. Selain itu, penyelenggaraan WOC 2009 ini pun dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membangkitkan kesadaran nasional mengenai pentingnya laut dan perairan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat serta

⁸⁰ *Tabloid Diplomasi DEPLU*, edisi 15 April-14 Mei 2009.

mendorong peningkatan kesadaran terhadap ancaman perubahan iklim, khususnya yang berkaitan dengan laut.

Adapun yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan WOC 2009 adalah sebagai berikut⁸¹:

1. Untuk menyepakati komitmen politik dalam upaya membawa isu kelautan ke dalam proses, pengaruh, dan kebijakan perubahan iklim global (*mainstreaming ocean sensitive policies in to climate change process*);
2. Menekankan pentingnya laut dan pesisir sebagai penyedia sumber daya dan jasa lingkungan untuk mendukung kehidupan umat manusia;
3. Menekankan pentingnya peranan laut sebagai komponen sistem perubahan iklim global dan proses *oceanografi* yang mempengaruhi perubahan iklim;
4. Meningkatkan pemahaman dunia mengenai:
 - a. Perubahan iklim dan dampaknya pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai, kondisi ekologi, dan wilayah pesisir,
 - b. Peran laut dalam menentukan perilaku atau laju fenomena perubahan iklim global,
 - c. Kebutuhan atas mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi perubahan iklim,

⁸¹ Freedy Numberi, *Peran Pembangunan Kelautan dalam Mengantisipasi Isu Perubahan Iklim*, disampaikan dalam Seminar Nasional Perubahan Iklim dan Prospek Ketahanan Nasional Jangka Panjang, diselenggarakan oleh Departemen Kelautan Dan Perikanan di Jakarta pada 14 Oktober 2009.

- d. Kerjasama antar-negara dalam mengelola sumber daya laut dalam konteks perubahan iklim,
- e. Peningkatan kemampuan masyarakat, terutama daerah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menghadapi perubahan iklim.

Inisiasi penyelenggaraan WOC 2009 ini pada akhirnya turut mempengaruhi eksistensi Indonesia dalam pergaulan internasional. Selain untuk mencapai kepentingan nasional, dengan diselenggarakannya WOC 2009 maka akan semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap permasalahan lingkungan setelah berhasil juga menyelenggarakan COP ke-13 UNFCCC tahun 2007 di Bali. Dengan semakin diakuinya Indonesia, maka selain akan meningkatkan *prestige* Indonesia juga akan lebih memudahkan Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara lain dalam berbagai bidang, terutama kaitannya dengan pemeliharaan lingkungan.

Menyadari pentingnya penyelenggaraan WOC 2009 ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai persiapan, baik dalam segi sarana prasarana ataupun sosialisasi pelaksanaan ke berbagai pihak. Untuk sarana dan prasarana penyelenggaraan WOC 2009, pemerintah Indonesia dan Sulawesi Utara telah menyiapkan lebih dari 5.000 kamar hotel berbintang, dimana 1.500 diantaranya adalah kamar baru. Selain itu terdapat hampir 10.000 kamar hotel melati, *cottage*, dan *homestay* yang siap melayani peserta WOC 2009. Infrastruktur penunjang lainnya juga dirampungkan sebelum pelaksanaan kegiatan, termasuk penyediaan

jaringan komunikasi sebesar 45 megabyte per menit, 4000 sambungan telepon seluler per menit, dan 10.000 sambungan *fixed-line* per menit⁸².

Untuk menyukseskan penyelenggaraan WOC 2009 berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mensosialisasikan penyelenggaraan WOC 2009. Selain mensosialisasikan penyelenggaraan WOC 2009, Indonesia juga melakukan diplomasi dengan cara mensosialisasikan *draft* MOD, dimana *draft* tersebut juga merupakan bentuk diplomasi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Pelaksanaan upaya sosialisasi ini penting dan menjadi langkah awal, serta penentu keberhasilan diplomasi multilateral yang dilakukan Indonesia melalui WOC 2009, karena dengan adanya persiapan, terutama sosialisasi yang intensif dan efektif, maka akan lebih mudah untuk mengundang peserta dalam berpartisipasi dan melakukan perundingan. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu secara bilateral ataupun multilateral.

Adapun yang dimaksud diplomasi bilateral disini adalah upaya diplomasi Indonesia kepada negara-negara calon peserta WOC 2009, baik dilakukan secara langsung dengan mengirimkan *aide memoire*⁸³ dan delegasi untuk bernegosiasi ke negara yang dimaksud ataupun dilakukan di sela-sela pertemuan internasional yang sedang berlangsung. Pengiriman delegasi ini tidak hanya dilakukan dengan mengirimkan diplomat-diplomat handal Indonesia untuk bernegosiasi, seperti Ali Alatas, tetapi juga dilakukan oleh Sinyo Harry Sarundajang sebagai penggagas dan juga delgesai lain yang tergabung dalam Panitia Nasional (PANAS) WOC

⁸² *Op.Cit*

⁸³ *Aide Memoire* merupakan surat atau memo yang berisi ringkasan perjanjian atau sejenis *term of reference* suatu kegiatan biasanya digunakan dalam komunikasi diplomatik).

2009. Sedangkan diplomasi multilateral yang dimaksud disini adalah upaya sosialisasi yang dilakukan Indonesia kepada organisasi-organisasi internasional, sosialisasi di forum internasional, ataupun pada pertemuan sebelum WOC 2009 yang dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri.

Dalam pelaksanaan diplomasi bilateral ke negara-negara calon peserta, Indonesia sendiri mengklasifikasikan negara-negara tersebut pada beberapa kelompok, yaitu *Like-Minded Country*, *Key Country*, dan *Participating Country*⁸⁴.

Like-Minded Country adalah negara-negara yang sehaluan atau negara-negara yang memiliki pemikiran yang sepaham dalam menyikapi suatu isu tertentu. Dalam permasalahan dampak perubahan iklim terhadap laut, negara yang termasuk *Like-Minded Country* adalah negara-negara kepulauan yang mengalami dampak secara langsung ataupun tidak langsung akibat kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Dukungan dari *Like-Minded Country* tentu akan menguatkan suatu isu untuk dibahas dan menghasilkan kesepakatan. Dukungan tersebut juga menjadi penting karena akan sulit bagi suatu negara mengajukan suatu isu sendiri karena hanya akan dianggap sebagai upaya pemenuhan kepentingan nasional negara itu sendiri bukan atas pertimbangan kepentingan internasional. Namun dengan adanya negara-negara lain yang turut meneriakkan isu tersebut, maka isu tersebut akan menjadi isu yang mengglobal dan akan mendapat perhatian dari dunia internasional.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rama, staff Direktorat Hukum Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri RI pada 21 Oktober 2009.

Adapun yang termasuk *Like-Minded Country* bagi Indonesia dalam pembahasan kaitan perubahan iklim dengan laut di forum WOC 2009 adalah negara-negara kepulauan, terutama di Pasifik, yang tergabung dalam SIDS, seperti Solomon, Kiribati, Fiji, Maldives, Palau, Tuvalu, dan lainnya, serta negara-negara yang tergabung dalam CT-6, yaitu Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Solomon, dan Malaysia.

Pengklasifikasian negara-negara tersebut selanjutnya adalah ke dalam kelompok *Key-Country*. Adapun yang dimaksud dengan *Key-Country* adalah negara-negara yang dianggap memiliki posisi penting dalam pergaulan masyarakat internasional, dimana dengan posisinya tersebut dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam menanggapi suatu isu tertentu. Posisi negara tersebut menjadi penting karena memiliki *power* yang besar, baik secara ekonomi, politik, ataupun militer.

Dengan *power* yang dimiliki dan berpengaruh dalam politik internasional, maka kehadiran *Key-Country* dalam konferensi dapat turut mempengaruhi hasil yang dicapai dalam konferensi. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor kedekatan dan kepentingan dari negara-negara peserta dengan *Key-Country* yang dapat mempengaruhi hubungan bilateral diantara kedua negara. Sebagai contoh misalnya sikap Australia yang cenderung sepaham dengan Amerika Serikat karena ada kedekatan bilateral diantara keduanya.

Adapun yang termasuk dalam *Key-Country* adalah negara-negara yang tergabung sebagai anggota Dewan Keamanan tetap PBB, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Perancis.

Klasifikasi terakhir adalah *Participating Country*. *Participating Country* adalah negara-negara yang turut diundang hadir dalam konferensi meskipun negara tersebut tidak memiliki kepentingan langsung atau tidak mengalami dampak perubahan iklim terhadap laut secara langsung. Namun kehadiran negara-negara tersebut dapat turut mendukung dan memperkuat pelaksanaan serta hasil dari konferensi tersebut. Kehadiran negara-negara tersebut menunjukkan besarnya dukungan negara-negara atau dunia terhadap isu yang diangkat dalam konferensi. Selain itu dengan banyaknya negara-negara yang juga menaruh perhatian terhadap isu yang dibahas, maka pelaksanaan dan hasil yang dicapai akan memiliki posisi penting dan perhatian besar dari masyarakat internasional.

Adapun negara-negara yang termasuk dalam *Participating Country* sebagai contoh adalah Brazil, Argentina, Denmark, Romania, dan lainnya.

Upaya sosialisasi Indonesia tidak berhenti hanya dengan hubungan bilateral, tetapi juga dilaksanakan dalam forum-forum internasional. Dalam forum-forum internasional itupun dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan sosialisasi bilateral dengan beberapa negara. Berikut beberapa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam forum-forum internasional:

1. ***The 4th Global Conference on Ocean, Coast, and Islands (GOC) 2008, pada 7-11 April 2008, di Hanoi, Vietnam.***

Di sela-sela pertemuan tersebut, Sinyo Harry Sarundajang—Gubernur Sulawesi Utara—melakukan *informal meeting* dengan *high level/ eminent participants*, diantaranya dengan Prof. Dr. Biliana Cicin-Sain selaku Ketua

panitia GOC 2008 dan direktur Global Forum, Dr. Ibrahim Thiauw selaku perwakilan dari UNEP, dan Dr. Chu Hoi Nguyen dari Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa Vietnam sekaligus ketua panitia lokal GOC 2008.

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyatakan dukungan terhadap WOC 2009. Prof. Dr. Biliana Cicin-Sain menyatakan bahwa *network Global Forum* yang terdiri dari lembaga-lembaga donor dan NGO internasional seperti *World Bank, Global Environment Facility, World Ocean Network, UNDP*, dan lainnya mendukung terlaksananya WOC 2009 di Manado. Perwakilan dari UNEP, Dr. Ibrahim Thiauw, juga menyatakan bahwa UNEP mendukung penuh dan berpartisipasi dalam persiapan penyelenggaraan WOC 2009.

2. *The 8th Meeting of States Parties UNCLOS 1982, 13-20 Juni 2008, di New York, Amerika Serikat.*

Pada pertemuan tersebut, Delegasi Republik Indonesia (DeIRI) yang diwakili oleh Eddy Pratomo—Direktur Jenderal Hukum perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI—menyampaikan informasi mengenai persiapan WOC 2009 dan sekaligus membagikan undangan disertai *aide memoire* mengenai WOC 2009 ke seluruh peserta.

Selain itu, DeIRI juga melakukan *informal breakfast discussion* dengan mengundang beberapa pihak peserta UNCLOS dari lima kawasan, terutama *key member states* dan *like-minded states* pada tanggal 19 Juni

2008. Pelaksanaan *informal breakfast discussion* ini dimaksudkan untuk mempromosikan dan memperoleh tanggapan terhadap inisiatif penyelenggaraan WOC 2009.

DelRI juga melakukan beberapa pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, Kanada, Jepang, dan China untuk memperoleh dukungan bagi pelaksanaan WOC 2009.

3. Sidang Umum PBB ke-63, pada 17 Desember 2008

Dalam Sidang Umum PBB ini dihasilkan sebuah keputusan bahwa WOC 2009 diadopsi menjadi agenda PBB yang kemudian dituangkan dalam Resolusi Omnibus (*Omnibus Resolution on Ocean and Law of the Seas*). Selanjutnya berdasarkan resolusi PBB 63/111 yang diadopsi pada 5 Desember 2008, menetapkan 8 Mei sebagai Hari Kelautan Dunia. Dalam *Omnibus Resolution on Ocean and Law of the Seas* disebutkan sebagai berikut⁸⁵:

“ Welcome The World Ocean Conference to be held in Manado, Indonesia in May 2009, as an opportunity to further understand the impact of climate change on oceans and the role of oceans to mitigate the rate of climate change”

⁸⁵ Indroyono Soesilo, *Mengapa Indonesia menggelar WOC 2009 dan CTI Summit* (diunduh pada tanggal 20 November 2009); dalam http://www.menkokesra.go.id/pdf/sesmenko/konferensi_pers_woc.pdf.

**4. Konsultasi *International Oceanographic Commission (IOC)*-
UNESCO, pada 4-5 Februari 2009, di Paris.**

Pada kesempatan konsultasi tersebut *Executive Secretary* IOC, Patricio Bernall, menyampaikan bahwa pihak IOC telah menyampaikan *circular note* tentang draft MOD kepada negara-negara anggota IOC. Patricio Bernall juga menyatakan arti penting WOC 2009 dalam *governance of the ocean* secara terintegrasi sehubungan dengan pengkajian laporan tentang kondisi kelautan global pada *assessment of the assessment* pada Sidang Majelis Umum PBB 2009 dan sebagai masukan untuk pengkajian ulang *Conference on Sustainable Development* pada 2014.

Secara khusus disebutkan bahwa WOC 2009 merupakan *unique opportunity* dalam rangka mendorong dimasukkannya aspek kelautan dalam proses negosiasi perubahan iklim.

Pada pertemuan yang dihadiri oleh 56 negara itu pula dilakukan konsultasi bilateral dengan beberapa negara, yaitu Argentina, Brazil, Perancis, Norwegia, China, Jepang, dan Madagaskar.

5. *Preparatory Meeting WOC 2009* bekerjasama dengan *UN Office in Geneva (UNOG)*, pada 9-10 Februari 2009 di Jenewa.

Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama yang dihadiri oleh seluruh anggota UNOG untuk melakukan pembahasan awal sekaligus menampung pandangan negara anggota atas rancangan MOD yang dipersiapkan oleh Indonesia.

Selain itu juga dilakukan konsultasi bilateral seperti dengan Mexico, Argentina, Chile, Amerika Serikat, Jerman, Bangladesh, Singapura, Venezuela, dan Filipina.

6. *Opening Plenary Ministerial Consultations 25th Governing Council Meeting* UNEP, pada 16 Februari 2009 di Nairobi.

Pada kesempatan tersebut, Freddy Numberi (Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia) menyerukan kepada negara-negara lain untuk turut memberikan perhatian pada sektor kelautan terkait dengan perubahan iklim. Dan menggalang kesatuan negara-negara untuk melakukan pembahasan mengenai hal tersebut dalam pertemuan WOC 2009 yang diselenggarakan Indonesia.

Dari berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai WOC 2009 ataupun draft MOD, baik secara bilateral ataupun dalam forum-forum internasional, mayoritas negara dan organisasi internasional menyampaikan apresiasi atas inisiatif Indonesia mengangkat isu kelautan terkait perubahan iklim. Negara-negara tersebut juga menyampaikan dukungan dan kesediaannya untuk turut berpartisipasi menghadiri WOC 2009.

B. Penyelenggaraan WOC 2009

WOC yang dilaksanakan pada tanggal 11-15 Mei 2009 ini diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia, Freedy Numberi. Kegiatan pertama dalam rangkaian WOC 2009 adalah pelaksanaan *Senior Official Meeting* (SOM) yang diikuti oleh 1.835 peserta, terdiri dari delegasi pejabat senior 73 negara dan 11 organisasi internasional yang bergerak di bidang lingkungan dan kelautan. SOM yang diadakan di *Grand Kawanua Convention Centre*, Manado, ini merupakan langkah awal dari pembahasan *Manado Ocean Declaration* (MOD) yang akan dideklarasikan pada tanggal 14 Mei 2009⁸⁶.

Pembahasan utama dalam WOC adalah mengenai upaya dan kesatuan komitmen untuk memasukkan isu kelautan dalam UNFCCC, termasuk aspek pedanaan, adaptasi, mitigasi, serta transfer teknologi. Dalam perundingan di WOC 2009 juga dibahas mengenai upaya penanganan kasus *illegal logging* yang banyak terjadi. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi perekonomian masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada hasil tangkapan ikan. Dibahas pula upaya untuk melakukan peningkatan kualitas masyarakat pesisir terutama terkait dengan penanganan perubahan iklim.

Hal yang juga turut dibahas adalah mengenai dimensi keamanan dan kedaulatan dalam kerangka perubahan iklim. Pihak yang paling kencang menyuarakan pentingnya pengelolaan laut untuk menyikapi perubahan iklim, terutama terkait keamanan, adalah negara-negara kepulauan kecil (AOSIS) yang beranggotakan 43 negara di kawasan Karibia, Afrika, Samudra Hindia, dan Pasifik, dimana diwakili oleh ketua AOSIS yang juga perwakilan tetap Grenada di

⁸⁶ *Kompas*, 11 Mei 2009.

PBB, Dessima Williams⁸⁷. Perwakilan AOSIS tersebut pun menyebutkan bahwa dampak perubahan iklim terhadap laut bagi negara kepulauan kecil juga menyentuh dimensi keamanan, dimana banyak negara di kawasan tersebut yang terancam hilang. Secara cukup emosional, perwakilan AOSIS mengharapkan agar negara-negara besar, seperti AS, turut berperan dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim. Namun pada akhirnya hal ini tidak dilanjutkan dalam pembahasan karena akan disediakan forum tersendiri oleh PBB.

Secara keseluruhan rangkaian kegiatan WOC 2009 berjalan dengan lancar. Semua negara mendukung setiap perundingan dan pembahasan yang dilakukan, termasuk AS yang biasanya alot dalam setiap perundingan mengenai perubahan iklim. AS hadir diwakili oleh Wakil Menteri Kelautan-nya dan menyertakan 40 ilmuwan. Bahkan delegasi AS juga menyertakan rekaman pidato Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, yang menyatakan dukungannya terhadap pembahasan isu kelautan dalam WOC dan mendukung dimasukkannya aspek kelautan dalam pembahasan di COP ke-15 UNFCCC di Kopenhagen, Denmark, pada Desember 2009. Pihak AS juga mengajak semua delegasi menjadikan isu biaya kemanusiaan untuk korban perubahan iklim sebagai isu utama dan terdepan. Sikap akomodatif yang ditunjukkan oleh AS ini tidak terlepas dari upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan pendekatan dan sosialisasi sebelumnya dengan pihak AS.

Kelancaran pelaksanaan WOC tersebut tidak lepas dari persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mensosialisasikan penyelenggaraan

⁸⁷ *Kompas*, 14 mei 2009

WOC dan *draft* MOD ke negara-negara calon peserta ataupun organisasi internasional

Selama penyelenggaraan WOC 2009 juga dilaksanakan beberapa kegiatan atau *side event* yang turut mendukung pelaksanaan WOC 2009. Adapun *side event* yang dilaksanakan selama pelaksanaan WOC 2009 tersebut adalah sebagai berikut:

1. *International Ocean Science, Technology, and Industry Exhibition*

Kegiatan pameran ini dilaksanakan selama kegiatan WOC 2009 berlangsung, yaitu tanggal 11-15 Mei 2009, dimana kegiatan ini diikuti oleh dua ratus peserta.

Pameran ini bertujuan untuk mengenalkan temuan dan teknologi baru, serta produk siap pakai dalam merespon dampak perubahan iklim terhadap laut. Selain itu, dengan adanya pameran ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai pentingnya laut dalam pembahasan perubahan iklim melalui sarana pendidikan, media, dan hiburan.

2. *International Ocean, Technology, and Policy Symposium*

Simposium ini dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 14 Mei 2009, dimana kegiatan ini dihadiri oleh 2.000 peserta dari 37 negara dengan empat ratus makalah dipresentasikan dan 69 poster ilmiah ditampilkan.

Tujuan dari dilaksanakannya simposium ini adalah sebagai wadah berbagai informasi diantara ilmuwan, praktisi, wirausahawan, dan para

pembuat kebijakan politik, mengenai isu kelautan dan perubahan iklim, termasuk dampaknya terhadap masalah ekologi, biologi, teknologi, dan sosial ekonomi, sesuai dengan kapasitas keilmuan atau bidang mereka.

3. *Global Oceans Policy Day*

Global Oceans Policy Day yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2009 dan dihadiri oleh 500 peserta dari 65 negara ini merupakan kegiatan hasil kerjasama Indonesia dengan *Global Forum on Oceans, Coasts, and Islands*, dimana pertemuan *multi-stakeholders* tingkat internasional ini mendiskusikan mengenai hasil pertemuan *4th Global Oceans, Coasts, and Islands Conference* di Hanoi, Vietnam, pada 7-11 April 2008.

4. *CTI Summit Meeting on Coral Reef, Fisheries, and Food Security*

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2009 ini merupakan pertemuan lanjutan dari program CTI 2nd SOM di Filipina yang membahas mengenai *CTI Action Plan*. CTI summit ini merupakan pertemuan kepala negara atau pemerintahan negara-negara yang tergabung sebagai anggota CT-6, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon.

Pada pertemuan ini dihadiri oleh para kepala pemerintahan dan negara dari negara anggota CT-6, yaitu Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono; Presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo; Presiden Timor

Leste, Ramos Horta; PM Kepulauan Solomon, Derek Sikua; PM Papua Nugini, Michael Somare; dan PM Malaysia, Najib Razak.

Kegiatan yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Amerika Serikat, Australia, dan beberapa NGO internasional ini bertujuan untuk merumuskan mengenai *action plan* dan implementasinya diantara negara-negara CT-6 tentang pelestarian laut, terutama terumbu karang.

Dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam WOC 2009, baik *main event* ataupun *side event*, kesemuanya memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menyatukan persepsi dunia mengenai pentingnya pemeliharaan dan pelestarian laut dalam menghadapi perubahan iklim. Oleh karena itu, pencapaian tertinggi yang dicapai dalam pelaksanaan WOC 2009 ini adalah dengan tercapainya sebuah kesamaan persepsi, terutama di negara-negara peserta, mengenai pentingnya peran laut dalam perubahan iklim, yang tertuang dalam sebuah dokumen komitmen bersama yaitu *Manado Ocean Declaration* (MOD).

C. Manado Ocean Declaration Sebagai Hasil yang Dicapai dalam WOC 2009

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dengan penyelenggaraan WOC 2009 ini diharapkan adanya *political will* yang kuat dari negara-negara peserta sehingga dapat tercapai kesepakatan yang dapat menjadi pemandu bagi pengelolaan kelautan dalam level global, dimana pada akhirnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam *Manado Ocean Declaration* (MOD). MOD merupakan komitmen setiap negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap laut

terkait kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat pantai dan pesisir serta mengenai pelestarian ekosistem laut.

Dalam pembahasan mengenai *draft* MOD ini terjadi perdebatan yang cukup alot, terutama diantara negara berkembang dan negara maju. Adapun yang menjadi perdebatan adalah mengenai penggunaan bahasa dalam *draft* MOD, mengingat bahasa deklarasi ini akan menjadi sangat penting bagi kelanjutan operasional selanjutnya. Negara berkembang ingin agar MOD menggunakan bahasa yang jelas dan mengikat dalam *draft* sehingga masalah yang berpengaruh terhadap ekosistem laut terefleksi dalam *draft* deklarasi, terutama mengenai sumber daya kelautan, gangguan sumber-sumber energi di pantai, keselamatan masyarakat pantai, serta masalah kelautan lainnya. Sedangkan negara maju ingin agar MOD tidak menggunakan *strong language* yang mengikat, karena deklarasi ini pada prinsipnya adalah sebuah komitmen politik sehingga hal-hal detail tidak perlu banyak dibicarakan.

Setelah mengalami perundingan yang cukup alot tersebut dan dilakukan revisi di beberapa bagian, akhirnya peserta WOC 2009 menyepakati untuk dideklarasikannya MOD. MOD sendiri terdiri dari 14 paragraf pembukaan dan 21 paragraf⁸⁸. Bagian pembukaan ini merujuk pada *Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, terutama kaitannya dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan pantai serta kewajiban untuk melakukan kerjasama, baik di tingkat regional ataupun pada level global. Selain itu juga merujuk pada Resolusi Omnibus Kelautan PBB. Pembukaan ini merupakan dasar pijakan, pengakuan,

⁸⁸ *Kompas*, 15 Mei 2009.

dan penekanan khusus mengenai perlunya isu kelautan dijadikan isu bersama secara global.

Sedangkan bagian operasional merupakan *statement* tentang hubungan dua arah antara perubahan iklim dan laut, termasuk penyusunan solusi-solusi berupa program adaptasi dan mitigasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim saat ini ataupun yang akan terjadi di masa depan. Bagian ini juga menyatakan bahwa isu kelautan ini menjadi bagian dari pembahasan dari kerangka kerja UNFCCC, termasuk masalah pendanaan yang diatur oleh *Adaptation Fund Board* dan juga mengenai transfer teknologi serta pembangunan bagi masyarakat pesisir.

Bagian operasional ini juga berisi mengenai rekomendasi yang menyatakan tentang cara-cara pengimplimentasian MOD menjadi wujud nyata, termasuk melakukan kerjasama yang diperlukan, seperti penelitian, pertukaran data, *capacity building*, transfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan dukungan pendanaan berkelanjutan, serta pernyataan untuk membawa isu kelautan hasil dari WOC 2009 ke dalam pembahasan di COP-15 Copenhagen, Denmark.

Secara garis besar beberapa capaian utama dari penyelenggaraan WOC 2009 yang tertuang dalam MOD adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya komitmen politik untuk membawa isu kelautan dalam proses, pengaruh, dan kebijakan global perubahan iklim (*mainstreaming ocean sensitive policies into climate change process*);
2. Disepakatinya kerjasama riset dan IPTEK, serta sistem pemantauan kelautan terpadu (*integrated ocean observation systems*);

3. Mendorong sekjen PBB untuk memfasilitasi koordinasi sistem PBB guna memasukkan isu kelautan dalam pembahasan perubahan iklim;
4. Penekanan pada kebutuhan sumber finansial serta insentif untuk membantu negara-negara berkembang menghadapi dampak perubahan iklim;
5. Mendorong keterlibatan UNFCCC dalam menyiapkan usulan proyek mencakup pengelolaan pesisir dan laut akibat perubahan iklim, serta pendanaan pengelolaan laut dan pesisir secara integral dengan menggunakan *Adaptation Fund Board (AFB)* UNFCCC;
6. Menekankan pentingnya kesamaan persepsi mengenai dampak perubahan iklim terhadap kelautan dan implementasi strategi mitigasi dan adaptasi dalam dimensi kelautan.

MOD disepakati secara aklamasi oleh peserta WOC 2009, dimana komitmen politik ini disetujui oleh 73 negara dan 11 perwakilan lembaga internasional, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Australia, Kanada, Jepang, dan sejumlah negara anggota Uni Eropa.

MOD resmi tercatat sebagai salah satu dokumen monumental dunia, dimana keberadaannya sejajar dengan Protokol Montreal (1987), Deklarasi Rio de Janeiro (1992), Protokol Kyoto (1997), Deklarasi Johannessburg (2002), dan Bali Roadmap (2007). Hal tersebut dikarenakan MOD menjadi satu-satunya kesepakatan dunia yang secara khusus membahas mengenai penyelamatan lingkungan dan laut dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Posisi MOD

melengkapi sekaligus menyempurnakan berbagai dokumen kesepakatan dunia sebelumnya yang masih sangat dominan penyelamatan bumi berorientasi daratan.

Salah satu isi dari MOD yang dianggap penting adalah di paragraf 12, sebagai berikut:

"We invite Parties to the UNFCCC to consider developing and submitting climate change adaptation project proposals for coastal and ocean management to the Adaptation Fund Board for consideration"

Dalam paragraf tersebut berisikan ajakan kepada seluruh peserta untuk memasukkan isu kelautan dalam kerangka kerja PBB untuk perubahan iklim, yaitu UNFCCC. Hal tersebut dikarenakan UNFCCC merupakan kerangka kerjasama tertinggi dan diakui dalam masyarakat internasional dalam pembahasan mengenai perubahan iklim. Selain itu, para peserta WOC juga setuju untuk mempertimbangkan masuknya proyek dan proposal terkait kelautan untuk mendapatkan dana dari *Adaptation Fund Board* (AFB) UNFCCC. (Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1).

Peserta WOC 2009 juga sepakat untuk membawa MOD sebagai hasil dari penyelenggaraan WOC 2009 ke forum COP ke-15 UNFCCC di Kopenhagen, Denmark, pada Desember 2009. Adapun poin-poin utama yang diajukan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai dampak perubahan iklim terhadap laut; peran laut menghadapi perubahan iklim global; kerjasama antar-negara internasional; adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Bagi Indonesia dengan dimasukkannya isu kelautan dalam pembahasan UNFCCC maka akan lebih mudah bagi Indonesia untuk mengakomodasi kepentingan Indonesia terhadap penanganan dampak perubahan iklim terhadap

laut, terlebih Indonesia mendapat dukungan penuh dari negara-negara kepulauan lain yang juga mengalami dampak perubahan iklim terhadap laut dan turut memperjuangkan isu kelautan dalam UNFCCC. Selain itu, dengan dimasukkannya pembahasan kelautan dalam pendanaan AFB maka akan memungkinkan bagi Indonesia untuk memperoleh pendanaan bagi penelitian laut, karena hingga saat ini penelitian mengenai laut, terutama kaitannya dengan perubahan iklim masih sangat minim. Dengan adanya dana penelitian tersebut maka akan mudah bagi Indonesia untuk semakin meyakinkan dunia mengenai pentingnya peran laut dalam penanganan dampak perubahan iklim.

Selain MOD, penyelenggaraan WOC 2009 pun menghasilkan suatu kesepakatan baru dalam kerjasama negara-negara yang tergabung dalam CT-6 sebagai hasil dari *CTI Summit Meeting on Coral Reef, Fisheries, and Food Security*. Adapun hasil dari pertemuan tersebut yang tertuang dalam *CTI Leader's Declaration* adalah sebagai berikut⁸⁹:

1. Menyediakan kesempatan lain untuk pertukaran pandangan yang lebih luas oleh pejabat tinggi dari anggota *coral triangle* dan wakil-wakil negara partner yang secara aktif mendukung CTI;
2. Menyediakan kesempatan untuk anggota CT-6 mengekspresikan prioritas mereka untuk dukungan dana dan teknis oleh negara pendukung dan mengekspresikan pandangan mereka mengenai manajemen dukungan tersebut dengan upaya-upaya implementasi CTI;

⁸⁹ Freedy Numberi, *Peran Pembangunan Kelautan dalam Mengantisipasi Isu Perubahan Iklim*, disampaikan dalam Seminar Nasional Perubahan Iklim dan Prospek Ketahanan Nasional Jangka Panjang, diselenggarakan oleh Departemen Kelautan Dan Perikanan di Jakarta pada 14 Oktober 2009.

3. Melanjutkan dialog tingkat tinggi pemerintah CT-6 dan negara partner yang sudah berjalan mengenai kelanjutan pengelolaan pantai dan daerah pesisir, terutama di wilayah *coral triangle* untuk kebaikan saat ini dan juga yang akan datang. (Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2).

Kesepakatan yang tertuang dalam MOD maupun CTI *Leader's Declaration* merupakan bentuk keberhasilan awal Indonesia dalam upaya penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap laut. Hasil tersebut menjadi momentum tepat bagi Indonesia untuk melanjutkan perjuangan dan kepemimpinan Indonesia dalam pembahasan mengenai perubahan iklim di forum internasional. Meskipun demikian, MOD hanyalah menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk mencapai tujuan utama pemerintah Indonesia dalam memasukkan isu kelautan dalam mekanisme UNFCCC.